

Judul : DPR Ingin Hak Rakyat Palestina Terlindungi
Tanggal : Kamis, 19 Februari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Rapat Perdana BoP DPR Ingin Hak Rakyat Palestina Terlindungi



Sukamta

WAKIL Ketua Komisi I DPR Sukamta berharap Presiden Prabowo Subianto menegaskan dukungan Indonesia terhadap Palestina dalam pertemuan perdana Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) di Amerika Serikat. Forum itu harus dipakai untuk mendorong konsistensi dukungan internasional bagi perjuangan rakyat Palestina.

Menurut Sukamta, Indonesia perlu menegaskan lagi komitmen solusi dua negara yang adil, bermartabat, dan sesuai hukum internasional, sekaligus mendorong penghentian segera kekerasan terhadap warga sipil. Keamanan harus jadi syarat utama bagi terwujudnya proses perdamaian yang berkelanjutan.

"Mendorong penghentian seluruh bentuk kekerasan serta memastikan perlindungan maksimal bagi warga sipil Palestina," ujar Sukamta dalam keterangannya, Selasa (17/2/2026).

Pertemuan itu juga wajib memastikan setiap agenda rekonstruksi dan pemulihan berjalan sekaligus bersama hak-hak rakyat Palestina dengan mengedepankan prinsip-prinsip kedaulatan. Perdamaian yang kokoh harus dibangun di atas keadilan, bukan sekadar penghentian konflik sementara.

"Harus ada komitmen dari

tiap pihak agar tiap agenda rekonstruksi dan pemulihan pasca-konflik berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak-hak rakyat Palestina," ucapnya.

Dia berharap, momentum ini dimanfaatkan pemerintah untuk mempertegas posisi Indonesia dalam memperjuangkan perdamaian dan keadilan global. Sikap konsisten terhadap nilai-nilai kemanusiaan penting agar peran Indonesia tetap dihormati di forum internasional. "Indonesia selalu konsisten memperjuangkan perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan," tegasnya.

Senada, Wakil Ketua Komisi I Dave Laksono mengatakan, rapat BoP jadi momentum untuk memastikan suara Indonesia terwakili secara adil. "Komisi I DPR memandang keikutsertaan Indonesia bukan hanya sebagai simbol, tapi juga kontribusi nyata dalam membangun tata kelola perdamaian yang inklusif dan berkelanjutan," ujarnya.

Komisi I DPR, lanjutnya, akan mengawasi agar keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace benar-benar membawa manfaat. Tak hanya itu, keikutsertaan Indonesia juga harus bisa memperkuat posisi sebagai pelopor perdamaian dunia.

"Dalam kerangka itu, Indonesia akan terus menyuarakan pentingnya keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk hak bangsa Palestina," imbuhnya.

Terkait belum bergabungnya Palestina dalam BoP, Dave menilai, proses menuju perdamaian bersifat dinamis dan membutuhkan ruang dialog yang terbuka serta inklusif. Setiap forum perdamaian akan lebih bermakna jika memberi kesempatan kepada semua pihak untuk terlibat dalam pembahasan yang konstruktif dan setara. ■ PYS